

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah melaksanakan kegiatan Magang 1 di UPPKB Gentong antara lain :

1. Untuk sarana dan prasarana di UPPKB Gentong sudah cukup memadai an dapat mendukung tugas serta fungsi UPPKB namun terdapat beberapa alat yang sebaiknya dilakukan perbaikan dan perawatan. Seperti Load Cell dan Indikator Timbangan.
2. Pada pelaksanaan SOP penindakan di UPPKB Gentong sudah dilakukan secara baik. Dengan adanya Briva yang memudahkan pelanggar dapat membayar denda dengan muah melalui Bank BRI, Tokopedia dan e tilang. Namun, terkadang alat Briva mengalami eror dan karena hal tersebut diberlakukan Tilang manual, yang mana nanti pelanggar dapat membayarnya langsung ketika Persidangan.
3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) juga sudah baik. Seperti ketersediaan Apar, kotak P3K dan susunan instalasi listrik yang aman dan rapi.
4. Untuk penerapan protokol kesehatan pada UPPKB Gentong Tasikmalaya sudah baik, petugas selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan saat bekerja. Namun, kesadaran penggunaan APD masih rendah.

## **V.2 Saran**

Sarang yang dapat kami sampaikan untuk perbaikan UPPKB Gentong ke depannya antara lain:

1. Untuk sarana dan prasarana supaya bisa dilengkapi dan dilakukan perawatan secara rutin berkala. Seperti penambahan lahan parkir dan gudang penyimpanan. Sehingga dapat melaksanakan kerja secara optimal.
2. Untuk Alat Pelindung Diri (APD) perlu dilengkapi lagi dan digunakan oleh petugas sehingga terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
3. Untuk Software Jembatan Timbang Online dapat dilakukan pemeliharaan supaya lebih cepat dalam proses penyimpanan data, sehingga mempercepat kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- BSI. (2018). Retrieved from bsi.ac.id:  
[https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/276283/File\\_10-Bab-II-Landasan-Teori-\(1\).pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/276283/File_10-Bab-II-Landasan-Teori-(1).pdf)
- Darat, D. J. (2020). Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.007/2/17/DRJD/2020 Tentang Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Penting. Jakarta: Direktur Jendral Perhubungan Darat .
- Darat, K. P. (2017). Peraturan DIrektur Perhubungan Darat Nomor SK : 736/AJ.108/DRJD/2017. Indonesia: Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. (2009). Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Indonesia: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, D. P. (1993). Peraturan Pemerintah Tahun 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan . Indonesia: Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
- Indonesia, K. M. (1995). Keputusan Menteri Indonesia Nomor : KM 5 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor. Indonesia: Menteri Perhubungan.
- Indonesia, M. P. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Indonesia: Kementerian Perhubungan.
- Indonesia, M. T. (2010). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. Indonesia: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kerja, M. T. (1996). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Indonesia: Kementerian Tenaga Kerja.
- Kesehatan, M. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disase 19 (Covid 19) 2020. Indonesia: Kementerian Kesehatan.
- Kesehatan, M. (2021). PM No 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan bermotor di Jalan. Indonesia: Kementerian Perhubungan.

Perhubungan, M. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Indonesia: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Perhubungan, M. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Indonesia: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Perhubungan, M. (2020, Oktober). Jembatan Timbang Online. Retrieved from <http://ditpras-jto.com/JTO/index.php/guest>

Perhubungan, M. (2021). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Retrieved from [https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk\\_hukum/timeline/Peraturan%20Menteri](https://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/timeline/Peraturan%20Menteri)

Tengah, P. P. (2012). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan. Jawa Tengah: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.